

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

VENNY RIA NGONGOLOY

MARTHEN L. KIMBAL

WELLY WAWORUNDENG

Abstrak: Infrastruktur berperan penting dalam memudahkan masyarakat setiap hari dalam melakukan aktifitas, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai bisa memberikan keberhasilan dalam suatu proses upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelayanan publik yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi. Pembangunan infrastruktur salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) dengan melihat aspek : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado pelaksanaannya belum berjalan baik. dalam Dalam aspek komunikasi kelurahan ataupun masyarakat yang wilayahnya memiliki titik-titik kerusakan jalan sudah beberapa kali mengusulkan bahkan ada yang memberikan keluhan untuk dilaksanakan pemeliharaan jalan tapi tidak di tanggapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Dari aspek Sumberdaya, dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan dari aspek sumberdaya anggaran menyesuaikan dari anggaran yang ada, serta kurangnya sumberdaya alat seperti mesin produksi aspal yang mengakibatkan pada produksi aspal, sehingga harus menunggu waktu pihak rekan dalam memproduksi aspal. Aspek Disposisi atau sikap respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam pelaksanaannya pemeliharaan jalan cenderung menunjukkan sikap yang kurang merespon keluhan-keluhan dari masyarakat ataupun kelurahan, kecamatan yang sudah berkali-kali mengeluhkan titik-titik kerusakan jalan untuk di lakukan pemeliharaan jalan Kota di Kota Manado. Sedangkan struktur birokrasi dalam pelaksanaannya dinas pekerjaan umum kota manado berdasarkan pada prioritas, hasil musrenbang, keluhan-keluhan dari masyarakat, serta turun langsung ke lokasi survey yang memiliki titik-titik kerusakan jalan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pemeliharaan Jalan*

Abstract

Infrastructure plays an important role for public to do activity everyday, with existing facilities and infrastructure can provide success in a process of efforts made by the government in public services marked by economic growth, industrialisasi and modernization. Infrastructure development is an important and vital aspect to accelerate the development process in Indonesian. The purpose of this study is to analyze the policy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado in maintaining road Infrastructure. This study uses a qualitative descriptive method. The focus of this research uses the theories from Edward III (in Subarsono 2011: 90-92) by looking at aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. There are 10 informans. Data collection techniques through observation, interviews, documentation and triangulation. In the result of this study indicate that policy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado in maintaining road Infrastructure it's implementation has not been going well. In Communication aspect, government district and community has often complained about road for improvements being proposed but until now public works and spatial planning department of District Manado not responding to their complaints and suggestions. In the aspect resources, implementation of road maintenance from budget resources adjusting from the existing budget, and there is lack of equipment resources asphalt mixing plant (AMP) which result in the production of asphalt, so it must wait for the time of the tender partners in producing asphalt. Aspect of disposition, attitude or disputation from public works and spatial planning department of District Manado in maintaining road Infrastructure tend to show a bad attitude like not responding to complaints the road Infrastructure by government district and community. And bureaucratic structure, in maintaining road Infrastructure public works and spatial planning department of District

Manado based on priorities, result of deliberations, complaints from the community, and oing down to the survey locations that have road damage points.

Key Word : Policy Implementation, Road Maintenance

PENDAHULUAN

Infrastruktur peranan penting dalam memudahkan masyarakat setiap hari dalam melakukan aktifitas, saat ini setiap negara memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pembangunan infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional, pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: "Penggangan dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program".

Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam pemeliharaan infrastruktur Kota Manado nyata terlihat pada Peraturan Walikota Manado N0.32 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Tipe B yaitu pada pasal 9 ayat 1 mengatakan dalam melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan di bidang bina marga serta melaksanakan penyusunan dan pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan pengendalian mutu dan

hasil pelaksanaan pekerjaan merupakan Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado khususnya di Bidang Bidang Bina Marga.

Pemeliharaan Jalan merupakan Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado berdasarkan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/ PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dikatakan bahwa pada pasal 1 ayat 12 bahwa pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Dengan melakukan perencanaan jalan meliputi pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan rehabilitasi jalan merupakan peraturan yang dibuat oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar dilaksanakan pemeliharaan jalan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Pemeliharaan rutin jalan dalam penanganannya yaitu pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun dan sifatnya sebagai pelindung terhadap kerusakan yang lebih parah. Adapun jenis kegiatan pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan terhadap lapis permukaan misalnya pelaburan aspal, penambalan lubang/*patching*, dan lain-lain. Dan pemeliharaan bahu jalan, antara lain pengisian material bahu jalan yang bergerus dan pemotongan rumput, serta drainase jalan yaitu pembersihan saluran agar tetap berfungsi saat musim hujan. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Rehabilitasi yaitu kegiatan yang tidak direncanakan atau dilakukan di luar rencana karena timbulnya kerusakan akibat hal-hal yang diluar dugaan,

bencana alam atau tidak dilakukan pemeliharaan rutin atau berkala jalan, dengan tujuan mengembalikan ke keadaan dapat berfungsi jalan. program kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga dari, dalam melaksanakan pemeliharaannya jalan rutin, berkala jalan, dan rehabilitasi jalan.

Pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota Manado seperti di Jalan Teluk Buyur samping Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Samratulangi, Jalan yang berada di kelurahan Bahu yaitu Jalan Pulau Lembeh, Jalan Kampus Selatan, Jalan Pulau Bunaken, Jalan di Kelurahan Malalayang Satu Timur di Lingkungan 5 (lima), dan Jalan yang berada di Kelurahan Batu Kota yaitu Jalan Maluku. Jalan-jalan tersebut merupakan jalan yang terdapat kerusakan, tapi yang hingga sekarang belum pernah dilakukan pemeliharaan jalan. Penyebab tidak terimplementasinya program pemeliharaan infrastruktur jalan adalah sumberdaya anggaran, dari penelitian yang didapatkan pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam pelaksanaannya diketahui menyesuaikan dari dana yang ada sehingga untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak optimal terlaksana, dan juga sumberdaya alat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado yang kurang memadai atau tidak memiliki alat produksi aspal hotmix sebagai bahan material pembuatan atau pemeliharaan jalan, sehingga mengakibatkan kurangnya produksi aspal hotmix karena harus menunggu waktu produksi aspal dari pihak rekan hingga mempengaruhi pada pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan diatas maka penulis perlu untuk mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dibahas secara mendalam, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur jalan".

KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada pelbagai dimensi kehidupan politik. oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut juga kebijakan publik (Ali dan Alam 2012:15)

KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menurut Smith (Tachjan, 2006:37), Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses Implementasi kebijakan dari proses kebijakan perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dengan melihat aspek sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Proses penyampaian informasi komunikator dalam hal ini.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya

- manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

KONSEP PEMELIHARAAN JALAN

Menurut Sehwarat dan Narang (2001:220) Pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).

Menurut Kondoatie (2003: 87), pemeliharaan pada jalan pada dasarnya pemeliharaan rutin (*routine*) dan berkala (*periodic*) dilakukan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (*betterment*) dilakukan hanya pada kondisi kerusakan struktural jalan. Pada kegiatan pemeliharaan jalan dapat dibagi tiga yaitu:

- a) Pemeliharaan Rutin (*Routine*): pemeliharaan berkala yang dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan di luar tugasnya sebagai pekerja.

- b) Pemeliharaan Berkala (*Periodic*): pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin berfungsinya jalan dengan baik dan untuk memperpanjang umur jalan tersebut.
- c) Serta pemeliharaan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (*betterment*).

KONSEP INFRASTRUKTUR JALAN

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. jalan merupakan infrastruktur yang paling berperan dalam perekonomian nasional (Bappenas, 2003, dikutip oleh Kenastri, 2007).

KONSEP PERANGKAT DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 1 ayat 1 Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2000: 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan diukur secara tepat.

FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dengan menggunakan teori dari George Charles Edwards the III dimana keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Proses penyampaian informasi komunikator dalam hal ini.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang

menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang diperoleh dalam mengungkapkan fenomena yang dijadikan objek penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Sumber data yaitu penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Lofland Moleong (2006:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata tindakan, selebihnya adalah tambahan data seperti dokumen dan sebagainya karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung observasi dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti itu sendiri. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, dan lainnya sebagainya.

INFORMAN PENELITIAN

- a. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sebanyak 1 orang
- b. Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sebanyak 1 orang
- c. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Manado sebanyak 1 orang
- d. Lurah Batu Kota sebanyak 1 orang
- e. Lurah Kleak sebanyak 1 orang

- f. Lurah Malalayang Satu Timur sebanyak 1 orang
- g. Lurah bahu sebanyak 1 orang
- h. Masyarakat 2 orang
- i. Ojek Online 1 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2013:62). Terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi
Nasution 1988 menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta dunia kenyataan yang diperoleh oleh observasi.
- b. Wawancara
Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- c. Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.
- d. Triangulasi
Dalam teknik pengambilan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Instrument Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti

itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya dalam (Sugiyono 2013:59).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman 1984 dalam Sugiyono 2013:91-99), sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), proses pemilihan atau menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan dengan membuat abstraksi.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu proses penyajian data yang telah direduksi kedalam bentuk uraian teks naratif bentuk-bentuk praktis perilaku sosial masyarakat.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*) merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado jangka waktu penelitian dimulai pada Februari sampai Juli tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Fokus dari penelitian ini menggunakan teori Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) yaitu dalam penelitian ini ingin mengetahui mengapa kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam

pemeliharaan infrastruktur jalan tidak terimplementasi. Dengan menggunakan teori dari Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) menjelaskan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :

a. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Proses penyampaian informasi komunikator dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut maka perlu melihat Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam mengimplementasikan kegiatan pemeliharaan jalan rutin, berkala jalan , dan bahkan rehabilitas jalan pada jalan yang mengalami kerusakan berat atau bencana alam sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado N0.32 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Tipe B.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam melaksanakan pemeliharaan jalan kurang membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Kelurahan, bahkan Masyarakat yang memiliki kerusakan jalan di wilayah mereka. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota DPRD Kota Manado, Kelurahan, dan Masyarakat yang mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado kurang merespond atau tidak menanggapi keluhan bahkan usulan-usulan perbaikan jalan di Jalan Kampus Timur atau Jalan yang berada di Teluk Buyur (FKM) ,Jalan di Kelurahan Bahu, Jalan. P. Lembeh,

Jalan Kampus Selatan, Jalan Maluku, Jalan Krida, dan Jalan di P. Maluku.

b. Sumberdaya

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena tidak akan berjalan efektif jika sumberdayanya kurang atau tidak memadai. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado memiliki kendala di Sumberdaya Anggaran dan Sumberdaya Peralatan.

Terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan karena untuk pemeliharaan jalan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado yang digunakan dalam menunjang pelayanan infrastruktur jalan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam melaksanakan pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado menyesuaikan dari anggaran yang ada, sehingga untuk kegiatan pemeliharaan jalan rutin, berkala jalan bahkan rehabilitasi jalan tidak berjalan secara optimal. Hal tersebut menjadi kendala tidak terlaksananya pemeliharaan jalan.

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Masalah sumberdaya peralatan merupakan salah satu kendala tidak terlaksananya pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado terhadap titik-titik kerusakan jalan yang berada di Kota Manado. Dari hasil penelitian yang didapat dalam memproduksi aspal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado harus menunggu waktu dari pihak rekan untuk memproduksi aspal hotmix dikarenakan

kurangnya alat atau mesin produksi aspal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam memproduksi aspal hotmix.

c. Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Dari penelitian yang di dapatkan, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Kleak, Lurah Batu Kota, Lurah, Bahu, Lurah Malalayang Satu Timur, dan keluhan dari Masyarakat dan Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Kota Manado mengatakan dari mereka sudah beberapa kali mengusulkan untuk dilaksanakan pemeliharaan jalan tapi sikap yang ditunjukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado tidak memberikan respond atau tidak menanggapi setiap usulan dari mereka. Sehingga dapat dinilai sikap dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado tidak menunjukkan sikap yang baik karena tidak menanggapi setiap usulan dari Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Kota Manado, Lurah Kleak, Lurah Batu Kota, Lurah, Bahu, Lurah Malalayang Satu Timur, dan keluhan dari Masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Peraturan Walikota Manado N0.32 Tahun 2017

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Tipe B yaitu pada pasal 9 ayat 1 mengatakan dalam melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan di bidang bina marga serta melaksanakan penyusunan dan pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan merupakan Tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado khususnya di Bidang Bidang Bina Marga.

Dari hasil penelitian yang didapat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan berdasarkan pada hasil musrenbang, usulan serta pengeluhan dari masyarakat, survey langsung ke lokasi, dengan melihat dari segi prioritas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/ PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dikatakan bahwa pada pasal 1 ayat 12 bahwa pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Dengan melakukan perencanaan jalan meliputi pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan rehabilitasi jalan merupakan peraturan yang dibuat oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar dilaksanakan pemeliharaan jalan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Dimana sebagaimana dalam peraturan menteri dalam pelaksanaan idealnya harus berdasarkan juga pada peraturan menteriyaitu pemeliharaan jalan pada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota dengan melakukan

pemeliharaan rutin, berkala jalan, dan rehabilitasi jalan sesuai kondisi jalan, dan bukan hanya berdasarkan pada hasil musrenbang, usulan serta pengeluhan dari masyarakat,serta survey langsung ke lokasi, dan melihat dari segi prioritas saja.

Penyebab lain tidak terlaksananya pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado adalah masalah pembebasan lahan merupakan kendala buat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado untuk melaksanakan pemeliharaan jalan, karena untuk pembebasan lahan harus disetujui oleh masyarakat. Tapi dari masyarakat menginginkan ganti rugi terhadap lahan mereka yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, mengenai implementasi kebijakan pemeliharaan jalan khususnya di beberapa jalan yang berada di Kelurahan Kleak, Kelurahan Bahu, Kelurahan Batu Kota, dan Kelurahan Malalayang Satu Timur dinilai masih kurang komunikasinya dilihat kurangnya respond dalam menanggapi setiap keluhan dari anggota DPRD Kota Manado, Lurah, bahkan Masyarakat.

2. Aspek Sumberdaya

Sumberdaya Anggaran, diketahui dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado masih belum terlaksana secara optimal karena harus menyesuaikan dari anggaran yang ada . Sumberdaya Peralatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Manado memiliki sumberdaya peralatan yang terbatas yaitu kendala tidak memiliki mesin produksi aspal. Sehingga pelaksanaan pemeliharaan jalan harus menggunakan alat produksi aspal dari pihak rekan atau tender dalam memproduksi aspal hotmix.

3. Aspek Disposisi

Pelaksanaan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam pelaksanaannya cenderung menunjukkan sikap yang tidak merespon atau kurang menanggapi i usulan-usulan perbaikan pemeliharaan jalan dari anggota DPRD Kota Manado, Masyarakat bahkan Lurah di Kelurahan Kleak, Kelurahan Bahu, Kelurahan Batu Kota, dan Kelurahan Malalayang Satu Timur yang wilayah pemerintahannya terdapat titik-titik kerusakan jalan.

4. Aspek Birokrasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam melaksanakan pemeliharaan jalan berdasarkan usulan, hasil musrenbang, skala prioritas, hasil survey, pengaduan dari masyarakat tapi tidak semua dilaksanakan bahkan tidak terlaksana. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Dinas yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado N0.32 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Tipe B.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan ditemukan beberapa permasalahan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jalan harus membangun komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan Anggota DPRD, Masyarakat, bahkan Lurah-Lurah yang memberikan pengaduan mengenai pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah mereka agar pemeliharaan rutin jalan, berkala jalan dan rehabilitasi jalan boleh terlaksana.

2. Sumberdaya

Terkait dengan Sumberdaya, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado harus mengadakan evaluasi revisi anggaran. Agar anggaran yang dibutuhkan boleh tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pemeliharaan jalan. Serta sarana dan prasarana seperti alat produksi aspal kiranya dapat disediakan agar bisa menunjang program kebijakan pemeliharaan jalan yang dibuat.

3. Disposisi

Terkait sikap pelaksana (Disposisi) diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dapat merespondan pendapat yang baik agar pelaksanaan implementasi kebijakan pemeliharaan jalan boleh terlaksana sesuai sasaran terhadap jalan-jalan yang memiliki titik-titik kerusakan jalan.

4. Struktur Birokrasi

Terkait hal ini, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam melaksanakan mekanisme pemeliharaan harus jelas seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado N0.32 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Tipe B dan berdasarkan juga pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta . Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, F dan Alam, A.S, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Bappeda, (2010). Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan*”.
- Keban, T. Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep , Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Kismartini, Dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Kodoatie, R. J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Kodoatie, R. J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Miles, dan H. 1984. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Kanisius. Yogyakarta
- Moleong, J. L. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Moleong, J. L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Kebijakan* Jakarta: Gramedia.
- O’connor, Patrick D. T. 2001. *Practical Reliability Engineering*, Fourth Edition, Jonh Wiley & Sons Ltd. England.

- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sehrawa, M.S and Narang J.S, 2001. *Production management*, Nai Sarak, Dhanpahat RAI Co.
- Subarsono. A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, E. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Situmorang, V. M. dan Jusuf. J. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan yang Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Werf, H. 1997. *Ilmu Manajemen Pemerintahan*. Jakarta
- Wahab, S. A. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, S. A. 2008 *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Winarno, B. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Jurnal dan Skripsi**
- Purnama, N. E. 2018. *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Samarinda
- Ransun Y. F. C, 2017 . *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Suhanda, F. 2016. *Peranan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Pamungkas, B.T 2009. *Pengaruh infrastruktur ekonomi, sosial dan aministrasi/institusi terhadap pertumbuhan propinsi-propinsi di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi Konsentrasi Publik Universitas Indonesia, Depok.
- Hapsari, T. 2011. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. skripsi. Fakultas ekonomi dan bisnis univesitas islam negeri syarifhi dayatullah
- Indriyani, D. F. 2018. *Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah*. Skripsi. Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Lumettu, J. 2018. *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu

Pemerintahan, Universitas Sam
Ratulangi, Manado.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

UU RI no. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.13/PRT/M/2011 Tentang Tata
Cara Pemeliharaan Dan Penilikan
Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Manado N0.32 Tahun
2017 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Manado
Tipe B

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Manado
Tahun 2014 – 2034

Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan
Nomor: Per- 875/K/24/2011 DAK

Sumber-Sumber Lain

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/perangkat_
daerah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/perangkat_daerah)